

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era pemerintahan modern, transformasi digital menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi administratif, tetapi juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan ini dengan meluncurkan berbagai program digitalisasi lintas sektor, termasuk di bidang industri, guna mempercepat pelayanan dan pengumpulan data berbasis elektronik. Salah satu langkah strategis adalah pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Salah satu implementasi digitalisasi yang strategis di sektor industri adalah pengembangan SIINAS, sebuah yang ditujukan untuk memfasilitasi pelaporan kegiatan industri secara daring oleh pelaku usaha serta mendukung pembuatan kebijakan berbasis data yang aktual dan terintegrasi. Meskipun sistem ini diharapkan dapat menjawab tantangan modernisasi data industri, faktanya masih banyak hambatan yang menghambat efektivitasnya, khususnya bagi sektor IKM. Sejak diberlakukan secara penuh pada 2019, penggunaan SIINAS masih menghadapi berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh hingga tahun 2025. Berdasarkan laporan Kemenperin (2022), tercatat bahwa sekitar 39% perusahaan industri belum secara rutin menggunakan SIINAS, padahal pelaporan tersebut merupakan kewajiban sesuai regulasi.

Selain kebutuhan akan basis data industri yang akurat, pembentukan SIINAS juga dipengaruhi oleh berbagai aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan digital industri. Kementerian Perindustrian sebagai leading sector memiliki mandat untuk merancang sistem informasi industri nasional sesuai amanat PP No. 29 Tahun 2018¹. Pengembangan SIINAS turut melibatkan Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE yang berperan sebagai pengolah utama data industri². Di sisi lain, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diinisiasi oleh KemenPAN-RB menjadi pendorong penting agar setiap kementerian

melakukan digitalisasi layanan secara terintegrasi³. Bappenas turut mendorong digitalisasi sektor industri melalui arah pembangunan nasional berbasis data sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024⁴. Selain itu, pelaku industri dan Dinas Perindustrian daerah juga menjadi aktor penting yang membutuhkan sistem pelaporan yang lebih mudah dan tidak manual⁵. Kombinasi faktor dan aktor ini membentuk SIINAS sebagai platform pelaporan industri terintegrasi secara nasional.

Perkembangan SIINAS dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan adanya berbagai dinamika, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin No. 2 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh pelaku industri untuk melakukan pelaporan melalui SIINAS. Namun, pada tahap awal penerapannya banyak Industri Kecil dan Menengah yang belum mengetahui kewajiban ini karena sosialisasi yang masih terbatas. Akibatnya, tingkat pendaftaran industri masih rendah, ditambah belum adanya sistem pendampingan yang memadai sehingga banyak pelaku industri belum familiar dengan penggunaan SIINAS.

Kewajiban pelaporan data industri melalui SIINAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi apabila tidak dipatuhi oleh pelaku industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Industri Nasional, pelaku industri wajib menyampaikan laporan kegiatan industri secara berkala melalui sistem SIINAS. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pelaku industri dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembinaan administratif, hingga pembatasan atau pembekuan layanan perizinan industri.

Pemerintah membentuk SIINAS sebagai respon terhadap kebutuhan akan basis data industri yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sebelum adanya SIINAS data industri nasional tersebar di berbagai instansi, tidak seragam, serta masih banyak menggunakan mekanisme pelaporan manual yang menyulitkan proses pengawasan, pembinaan, dan perencanaan pembangunan industri. SIINAS dikembangkan untuk melaksanakan amanat PP No. 29 Tahun 2018 dan Permenperin No. 2 Tahun 2019 yang mengharuskan pemerintah menyediakan

sistem informasi industri sebagai sarana pelaporan resmi bagi seluruh pelaku industri termasuk IKM. Selain itu, pembentukan SIINAS merupakan bagian dari agenda transformasi digital pemerintah melalui SPBE, yang bertujuan meningkatkan transparansi, mempercepat layanan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan data industri. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat memantau perkembangan industri secara real-time, meningkatkan kepatuhan pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan, memastikan program pembinaan dan intervensi kebijakan berjalan lebih tepat sasaran.

Melalui sistem SIINAS, pelaku industri diwajibkan menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatannya secara berkala. Informasi yang dilaporkan antara lain meliputi data identitas perusahaan, jenis dan kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku, nilai investasi, serta perkembangan kegiatan produksi dan distribusi. Data tersebut menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam memantau perkembangan sektor industri secara nasional. Bagi pemerintah, data yang dihimpun melalui SIINAS digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan industri, perencanaan pembangunan sektor industri, pemberian pembinaan kepada pelaku usaha, serta evaluasi terhadap kinerja dan perkembangan industri di berbagai wilayah. Dengan begitu, keberadaan SIINAS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan industri yang berbasis data (*evidence-based policy*).

Pada tahun 2020, mulai terjadi adaptasi sistem digital secara nasional, namun pandemi COVID-19 menjadi kendala utama dalam proses sosialisasi dan pelatihan. Kondisi ini menyebabkan banyak IKM kesulitan dalam mengakses teknologi dan mengikuti pelatihan daring. Meskipun digitalisasi menjadi kebutuhan penting, tingkat literasi digital pelaku industri masih tergolong rendah.

Selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah mulai menyelenggarakan pelatihan daring untuk membantu pengguna memahami sistem SIINAS. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak kendala teknis, seperti error pada sistem dan tampilan antarmuka (UI/UX) yang dianggap kurang ramah pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum diperbarui secara optimal berdasarkan masukan dari pengguna.

Pada tahun 2022, hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian masih berada pada tahap menengah dalam penerapan sistem digital. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain keterlambatan proses validasi, kurangnya notifikasi kesalahan input, serta belum terintegrasinya SIINAS dengan sistem Online Single Submission (OSS). Permasalahan terkait integrasi, kecepatan sistem, dan kemudahan penggunaan semakin banyak dikeluhkan oleh pelaku industri.

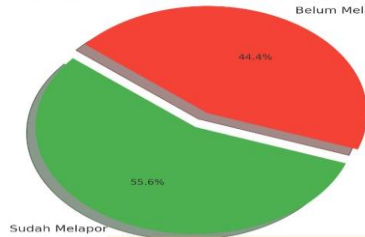
Kemudian, pada tahun 2023, data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa hanya sekitar 61% industri yang aktif melapor melalui SIINAS, Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi industri masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang belum merata hingga ke daerah-daerah, serta masih minimnya edukasi mengenai cara penggunaan sistem tersebut, Pada tahun 2024, muncul dorongan integrasi SIINAS dengan OSS untuk memudahkan proses pelaporan industri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti duplikasi input data dan meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan data industri. Upaya integrasi ini memang menjadi langkah penting, tetapi realisasinya belum berjalan secara optimal.

Terakhir, pada tahun 2025, diterbitkan Permenperin No. 13 Tahun 2025 yang mengubah sistem pelaporan industri menjadi triwulanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pelaporan, namun berbagai permasalahan lama masih belum terselesaikan. Partisipasi industri masih rendah, tampilan sistem belum ramah pengguna, integrasi dengan sistem lain berjalan lambat, dan isu keamanan data masih menjadi sorotan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi dan pembaruan kebijakan, implementasi SIINAS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar tujuan digitalisasi industri dapat tercapai secara optimal.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan monitoring serta evaluasi terhadap pelaporan SIINAS. Pada kegiatan tersebut ditemukan bahwa sebanyak

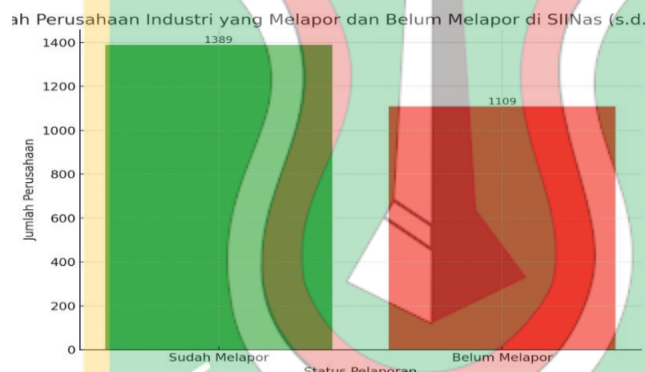
1.109 perusahaan industri di wilayah Jakarta belum melakukan pelaporan semester melalui SIINAS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku industri dalam melaporkan data industri melalui SIINAS.

Pelaporan SIINAS oleh Perusahaan Industri (s.d. Septen



Gambar 1. 1 Proporsi Perusahaan yang Sudah dan Belum Melapor di SIINAS (2022)

Sumber : Kementerian Perindustrian. (2019–2025). Dokumen Permenperin, LaporanSIINas,danEvaluasiPelaksanaanPelaporanIndustri.Jakarta



Gambar 1. 2 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Status Pelaporan SIINAS

Sumber : Kementerian Perindustrian. (2019–2025). Dokumen Permenperin, LaporanSIINas,danEvaluasiPelaksanaanPelaporanIndustri.Jakarta

Grafik pie chart dengan judul “*Proporsi Perusahaan yang Sudah dan Belum Melapor di SIINAS (Per September 2022)*” menggambarkan perbandingan proporsional antara perusahaan industri yang telah melakukan pelaporan semesteran melalui sistem SIINAS dan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Berdasarkan data Dinas PPKUKM wilayah Jakarta Selatan, dari total 2.498 perusahaan industri yang terdaftar, tercatat sebanyak 1.389 perusahaan atau sekitar 55,61% telah melapor, sementara 1.109 perusahaan lainnya atau sekitar 44,39% belum melaporkan data mereka. Visualisasi dalam bentuk pie chart ini

menyoroti bahwa hampir separuh dari perusahaan yang diwajibkan melapor belum menjalankan kewajibannya, Hal ini mengindikasikan masih terdapat permasalahan serius dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaporan industri, sekaligus mencerminkan tantangan dalam implementasi dan optimalisasi sistem SIINAS sebagai alat pengumpulan data industri nasional yang akurat dan terkini.

Grafik bar chart berjudul “*Jumlah Perusahaan Berdasarkan Status Pelaporan SIINAS (Per September 2022)*” menyajikan representasi visual dari jumlah absolut perusahaan industri berdasarkan status pelaporan mereka dalam sistem SIINAS. Data menunjukkan bahwa dari total 2.498 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 1.389 perusahaan telah melakukan pelaporan semesterannya, sementara 1.109 perusahaan belum menyampaikan laporan tersebut. Grafik batang ini efektif dalam menunjukkan secara eksplisit kesenjangan antara perusahaan yang patuh dan yang belum patuh terhadap kewajiban pelaporan.

Berdasarkan data yang tersedia, informasi pelaporan SIINAS pada periode 2022–2024 masih disajikan secara gabungan se-kecamatan pada tingkat Kota Jakarta Selatan dan tidak tersedia secara rinci berdasarkan wilayah kecamatan. Kondisi ini dikarenakan data pada periode tersebut telah melewati masa pelaporan dan pengarsipan, sehingga data yang dapat diakses secara resmi hanya berupa rekapitulasi umum. Meskipun itu data tahun 2022–2024 tetap sesuai digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan tren umum tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan melalui SIINAS di Kota Jakarta Selatan.

Tabel 1. 1 Data Registrasi Akun SIINAS Kota Jakarta Selatan tahun 2022–2024

Data Registrasi Akun SIINas Kota Jakarta Selatan

Data 2022 Kota Jakarta Selatan					Data 2023 Kota Jakarta Selatan					Data 2024 Kota Jakarta Selatan					Data 2025 Kota Jakarta Selatan				
Category	Kecil	Menengah	Besar	Belum Melapor	Category	Kecil	Menengah	Besar	Belum Melapor	Category	Kecil	Menengah	Besar	Belum Melapor	Category	Kecil	Menengah	Besar	Belum Melapor
Januari	6	0	1	0	Januari	7	0	5	2	Januari	20	4	6	0	Januari	12	0	3	1
Februari	6	0	2	0	Februari	8	2	4	3	Februari	12	2	6	1	Februari	22	1	3	0
Maret	5	1	4	0	Maret	23	1	3	1	Maret	53	1	6	3	Maret	23	3	1	0
April	6	1	3	0	April	6	2	5	0	April	31	0	8	1	April	10	1	2	2
Mei	5	0	3	0	Mei	13	3	2	1	Mei	42	2	4	3	Mei	8	2	1	0
Juni	3	0	2	1	Juni	12	1	8	0	Juni	53	1	4	8	Juni	11	1	3	0
Juli	4	1	3	2	Juli	11	0	4	0	Juli	70	2	7	3	Juli	14	1	7	1
Agustus	5	2	4	1	Agustus	16	1	14	0	Agustus	59	2	6	1	Agustus	12	2	4	2
September	5	0	2	0	September	23	3	6	1	September	34	1	9	2	September	11	2	3	8
Oktober	1	0	1	1	Oktober	113	2	5	3	Oktober	53	0	5	1	Oktober	10	1	5	5
November	6	0	1	3	November	105	1	9	2	November	61	0	11	0	November	11	1	1	36
Desember	8	0	2	1	Desember	11	4	1	2	Desember	18	0	3	5	Desember	5	0	1	23

Tabel Data Registrasi Akun SIINAS Kota Jakarta Selatan tahun 2022–2024 menyajikan informasi jumlah pelaku industri yang terdaftar dan melakukan pelaporan berdasarkan kategori industri, yaitu industri kecil, industri menengah, industri besar, serta pelaku industri yang belum melakukan pelaporan. Data tersebut disajikan secara bulanan dan digunakan untuk menggambarkan perkembangan partisipasi pelaku industri dalam pemanfaatan SIINAS. Berdasarkan data tahun 2022, terlihat bahwa jumlah pelaku industri yang melakukan pelaporan masih didominasi oleh kategori industri kecil, sementara industri menengah dan industri besar menunjukkan jumlah yang relatif lebih rendah. Meskipun demikian, pada tahun ini masih ditemukan pelaku industri yang belum melaporkan data melalui SIINAS, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal implementasi, tingkat kepatuhan pelaporan industri masih belum sepenuhnya optimal.

Pada tahun 2023, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku industri yang melakukan pelaporan, terutama pada kategori industri kecil. Namun, peningkatan tersebut belum diikuti secara merata oleh industri menengah dan industri besar. Selain itu, masih terdapat pelaku industri yang belum melakukan pelaporan, yang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pendampingan penggunaan SIINAS masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah registrasi dan pelaporan industri kecil mengalami

peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pemanfaatan SIINAS. Namun demikian, data juga memperlihatkan bahwa pelaku industri yang belum melapor masih tetap ada pada hampir setiap bulan, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pelaporan belum sepenuhnya teratasi.

Tabel 1. 2 Laporan Data Industri Periode Semester Tahun 2025

REKAPITULASI PENYAMPAIAN DATA LAPORAN INDUSTRI PERIODE SEMESTER TAHUN 2025												
NO	KETERANGAN	KECAMATAN									TOTAL	
		Kebayoran Baru	Kebayoran Lama	Pasar Minggu	Jagakarsa	Cilandak	Tebet	Pancoran	Setiabudi	Pesanggrahan		Mampang Prapatan
1	Daftar Perusahaan Yang Telah Menyampaikan Laporan Industri Periode Semester Tahun 2025	53	40	35	11	43	47	13	114	14	32	402
2	Daftar Perusahaan Yang Belum Menyampaikan Laporan Industri Periode Semester Tahun 2025	201	163	168	111	143	133	95	280	67	121	1482
TOTAL		254	203	203	122	186	180	108	394	81	153	1884

Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai jumlah perusahaan industri di Kota Jakarta Selatan yang telah menyampaikan laporan dan belum menyampaikan laporan melalui SIINAS. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, data pada tahun 2025 disajikan secara lebih rinci berdasarkan wilayah kecamatan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan pelaporan industri pada level wilayah administratif. Penyajian data per kecamatan pada tahun 2025 dimungkinkan karena data pada periode ini masih bersifat aktual dan terdokumentasi secara lebih lengkap, sedangkan data pada periode 2022–2024 hanya tersedia dalam bentuk gabungan se-kecamatan tingkat kota Jakarta selatan karena telah melewati masa pelaporan dan pengarsipan. Oleh karena itu, data tahun 2025 digunakan sebagai dasar analisis wilayah dalam penelitian ini, sementara data tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk menggambarkan tren umum implementasi SIINAS di Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat sebanyak 402 perusahaan industri telah menyampaikan laporan industri semester tahun 2025, sedangkan 1.482 perusahaan

industri lainnya belum melakukan pelaporan, Secara keseluruhan, jumlah perusahaan industri yang tercatat di Kota Jakarta Selatan pada periode ini mencapai 1.884 perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi perusahaan yang belum menyampaikan laporan masih mendominasi dibandingkan dengan perusahaan yang telah melapor, meskipun sistem pelaporan SIINAS telah diberlakukan secara nasional. Dikaji berdasarkan kecamatan, Kecamatan Setiabudi merupakan wilayah dengan jumlah perusahaan industri terbanyak, yaitu 394 perusahaan, yang terdiri dari 114 perusahaan yang telah melapor dan 280 perusahaan yang belum melapor, Tingginya jumlah perusahaan industri di wilayah ini tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan pelaporan yang sebanding, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara aktivitas industri dan pemanfaatan sistem pelaporan digital.

Kecamatan lain seperti Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan Pasar Minggu juga menunjukkan jumlah perusahaan industri yang relatif tinggi. Namun, pada wilayah-wilayah tersebut, jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan masih lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang telah melapor, Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kepatuhan pelaporan industri tidak hanya terpusat pada satu wilayah, melainkan terjadi secara relatif merata di berbagai kecamatan di Kota Jakarta Selatan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah perusahaan industri yang relatif lebih sedikit, seperti Pesanggrahan dan Pancoran, juga tetap menunjukkan keberadaan perusahaan yang belum menyampaikan laporan, Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pelaporan tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan faktor lain, seperti pemahaman pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan, tingkat literasi digital, serta efektivitas sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait.

Sejalan dengan data bulanan tahun 2022–2024, data tahun 2025 juga menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan pembaruan kebijakan dan sistem pelaporan, termasuk perubahan mekanisme pelaporan menjadi lebih terstruktur, jumlah pelaku industri yang belum melapor masih cukup menonjol, Ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku industri dalam memanfaatkan SIINAS masih menghadapi tantangan, khususnya dalam mendorong konsistensi

pelaporan secara berkala. Secara keseluruhan, tabel diatas menunjukkan bahwa implementasi SIINAS di Kota Jakarta Selatan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, terutama dari sisi ketersediaan data yang semakin rinci pada tahun 2025. Namun, keberadaan pelaku industri yang belum melapor secara konsisten menunjukkan bahwa optimalisasi sistem SIINAS masih memerlukan perhatian lebih lanjut, baik melalui peningkatan sosialisasi, penyederhanaan sistem, maupun pendampingan teknis yang lebih intensif bagi pelaku IKM, agar SIINAS dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pelayanan publik digital.

Adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi dari pelaku IKM yang secara khusus merupakan tulang punggung perekonomian nasional IKM sering kali menghadapi hambatan seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah masing- masing. Khususnya di wilayah Jakarta yang terutama adalah pusat pemerintahan dan perekonomian, masih ditemukan pelaku IKM yang belum terdaftar di SIINAS atau tidak aktif melakukan pelaporan secara berkala (AntaraneWS, 2023). Ini menunjukkan masalah SIINAS bukan hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di pusat kota, Dari sisi teknis banyak pengguna SIINAS mengeluhkan tampilan sistem yang membingungkan, kurang ramah pengguna, serta lambat dalam memproses dan memverifikasi data (Laporan Ditjen KPAII, 2023).

Kurangnya notifikasi kesalahan saat penginputan juga menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna Selain itu, hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) oleh KemenPAN-RB tahun 2022 menunjukkan bahwa Kemenperin masih berada pada level menengah dalam aspek integrasi dan pelayanan digital. Hal ini mencerminkan bahwa SIINAS belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem lain seperti OSS (Online Single Submission), sehingga menimbulkan pengulangan data dan tidak efisien dalam pelayanan. Masalah lainnya terletak pada aspek pendampingan dan edukasi, di mana program sosialisasi penggunaan SIINAS lebih banyak menysasar kota-kota besar dan belum menyentuh pelaku IKM di daerah-daerah secara merata.

Industri Kecil dan Menengah merupakan unit usaha produktif yang

dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, Peran ini terlihat dari tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor usaha kecil, baik yang bersifat tradisional maupun modern, sebagai sumber penghidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan IKM di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan. (Thursina dkk, 2023). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan IKM, kebutuhan akan *system* pengelolaan data yang lebih efisien dan akurat menjadi semakin penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam pengelompokan skala usaha industri, pemerintah Indonesia mengklasifikasikan pelaku usaha berdasarkan besaran omzet atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha kecil merupakan usaha produktif yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga paling banyak Rp2,5 miliar. Usaha menengah merupakan usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar. Sementara itu, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp50 miliar dan umumnya memiliki kapasitas produksi serta struktur organisasi yang lebih kompleks.

Digitalisasi data IKM merupakan upaya untuk mentransformasi informasi seperti aktivitas usaha, jenis produk, dan operasional bisnis ke dalam format digital yang dapat diakses serta dikelola secara elektronik. Proses ini melibatkan penerapan teknologi informasi software, termasuk dukungan infrastruktur digital yang mengatur serta mengelola data terkait sektor IKM. Tujuannya adalah menggantikan metode tradisional yang masih bersifat manual atau paper-based dengan sistem yang lebih optimal, sistematis, dan terkini dalam hal pengumpulan maupun pengolahan data usaha. Upaya ini menjadi sangat tepat mengingat peran strategis IKM dalam struktur perekonomian nasional, IKM sebagai salah satu sektor ekonomi strategis yang bertindak penting dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Selain berperan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran, IKM juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara luas. Sektor ini mencakup beragam bidang usaha, antara lain pangan, kerajinan, fashion, dan sektor lainnya (Ardani, 2023). Dengan kontribusi yang signifikan tersebut, IKM menyimpan potensi besar yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan merata. (Satria dkk, 2023). Industri Kecil dan Menengah memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia.

Salah satu contohnya dapat dilihat pada sektor pangan, dimana IKM mampu mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi yang siap dipasarkan. Di sisi lain, sektor kerajinan juga menunjukkan potensi serupa melalui produksi barang-barang unggulan yang mengandung nilai estetika dan budaya, serta mampu merepresentasikan identitas khas suatu daerah, dengan potensi yang besar ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang lebih intensif dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor IKM di Indonesia. (Satria dkk, 2023). Selain potensi yang dimilikinya, sektor IKM juga memberikan dampak langsung yang bermakna terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

IKM memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kemajuan ekonomi, IKM mampu menghasilka lapangan kerja baru, terutama untuk masyarakat yang berdiam di daerah terpencil. IKM turut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil melalui kegiatan produksi dan penjualan berbagai produk, IKM berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. (Satria et al., 2023), Selain itu, keberadaan IKM juga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di berbagai daerah. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sector ini, Pemerintah Indonesia melewati Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Di bawah Kementerian Perindustrian, telah menginisiasi sejumlah kegiatan dan prosedur yang difokuskan pada peningkatan efektivitas serta persaingan IKM di tingkat nasional (Kementerian Perindustrian, 2023).

Namun, seiring berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, sektor IKM juga dihadapkan pada dinamika baru yang menuntut kemampuan beradaptasi secara cepat dan inovatif. Dalam menghadapi era globalisasi dan

Revolusi Industri 4.0, IKM diminta inovatif untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan memberikan berbagai peluang baru, namun sekaligus menghadirkan persoalan bagi IKM dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, serta kemampuan berinovasi di wilayah Jakarta, meskipun sebagian IKM sudah mulai mengangkat teknologi digital, pemanfaatannya masih terbatas dan umumnya hanya difokuskan pada aspek pemasaran melalui media sosial . (Khalik dkk, 2024)

Digitalisasi data IKM memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mempermudah proses pemantauan terhadap perkembangan dan kinerja sektor IKM di wilayah masing-masing, Dengan tersedianya sistem informasi yang telah terdigitalisasi, proses pelacakan dan evaluasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Informasi mengenai jumlah unit usaha, bentuk produk yang didapatkan, hingga keseluruhan tenaga kerja yang terlibat dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat. Kemudahan ini menjadi dasar yang penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menyalurkan dukungan yang tepat sasaran bagi pengembangan IKM secara berkelanjutan. (Satria dkk, 2023)

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital IKM bukan sekedar bergantung pada tersedianya teknologi, tetapi juga pada sejauh mana sistem digital yang ada dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh para pelaku usaha. Dalam teori pelayanan publik digital, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada infrastrukturnya, tetapi juga pada kemampuan aktor pengguna dalam mengakses dan memahami sistem tersebut (Lips, 2020; Dwiyanto, 2006). Dengan melihat realitas ini, perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi IKM dalam SIINAS, terutama di wilayah yang seharusnya memiliki infrastruktur dan akses yang memadai seperti Jakarta selatan. Penelitian ini penting untuk merumuskan optimalisasi SIINAS agar benar-benar mampu mendukung tujuan pelayanan publik digital yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Rendahnya partisipasi IKM dalam pemanfaatan SIINAS membawa implikasi yang berarti terhadap keakuratan data industri yang menjadi dasar dalam

perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Apabila tingkat partisipasi pelaku industri dalam SIINAS tidak mengalami peningkatan, maka data industri nasional berpotensi terus mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan, Hal ini dapat berdampak pada kesalahan dalam perencanaan kebijakan strategis, distribusi insentif, serta pengembangan kawasan industri yang tidak berbasis pada realitas aktual (Yulinda, 2023: 5). Padahal, IKM merupakan kelompok pelaku usaha yang justru paling membutuhkan perhatian dari sisi kebijakan. Tanpa partisipasi aktif IKM dalam pelaporan melalui SIINAS, potensi ekonomi lokal akan sulit dipetakan secara akurat.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji dinamika penggunaan SIINAS oleh pelaku IKM, khususnya di wilayah Jakarta Selatan sebagai salah satu pusat kegiatan industri dan pemerintahan. Rendahnya tingkat pelibatan IKM dalam pelaporan mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan digitalisasi yang telah dirumuskan dengan praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi factor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi IKM dalam pelaporan SIINAS, baik dari aspek teknis, struktural, maupun persepsi pelaku usaha terhadap *system*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan upaya optimalisasi SIINAS agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan inklusif oleh seluruh pelaku industri, khususnya IKM.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya partisipasi Industri Kecil dan Menengah di DKI Jakarta dalam memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional sebagai media pelaporan digital menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya sosialisasi, serta sistem yang belum sepenuhnya ramah pengguna diduga memengaruhi tingkat partisipasi pelaku IKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji optimalisasi SIINAS dalam meningkatkan partisipasi pelaku IKM. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Industri Kecil Menengah di Dinas PPKUKM Jakarta Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam meningkatkan partisipasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Dinas PPKUKM Jakarta Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan teoritis dalam pengembangan wacana akademik di bidang administrasi publik, khususnya pada kajian pelayanan publik digital berbasis sistem informasi di sektor industri. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman ilmiah mengenai faktor-faktor non-teknis seperti aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi partisipasi pelaku perusahaan, khususnya IKM, dalam sistem pelayanan digital pemerintah. Selain itu, penelitian ini turut menambah literatur mengenai tantangan implementasi kebijakan digitalisasi di lingkungan IKM perkotaan seperti DKI Jakarta, yang selama ini masih jarang menjadi fokus utama dalam studi administrasi publik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model evaluasi partisipasi publik dalam sistem informasi digital pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik yang berbasis teknologi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada pembaca, khususnya pihak terkait, mengenai upaya optimalisasi SIINAS dalam meningkatkan partisipasi pelaku IKM di wilayah DKI Jakarta

a. Bagi Kementerian Perindustrian

Penelitian ini diharapkan dapat menyarankan kebijakan strategis yang mendukung peningkatan penggunaan SIINAS di kalangan pelaku IKM. Temuan-temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk merancang sistem yang lebih ramah pengguna dan lebih sesuai dengan kebutuhan industry kecil dan menengah.

b. Bagi Dinas Perindustrian Provinsi DKI Jakarta

Hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Perindustrian dalam merancang program sosialisasi dan pendampingan teknis yang lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi pelaporan SIINAS yang rendah. Ini juga akan membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai berdasarkan tantangan lokal.

c. Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku IKM dalam menggunakan SIINAS. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas mereka terhadap sistem, sehingga mendukung peran IKM dalam perekonomian nasional.

d. Bagi Pengembang Sistem SIINAS

Penelitian ini memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan sistem SIINAS, seperti perbaikan desain antarmuka, alur pelaporan, dan fitur yang lebih user-friendly yang bertujuan untuk system yang lebih terbuka, responsif, dan adil bagi seluruh pengguna.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdomisili dan beroperasi di salah satu wilayah Jakarta Selatan. Fokus penelitian terletak pada tingkat partisipasi IKM dalam penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.6 Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan isi dari penelitian ini

secara menyeluruh, disusunlah sistematika penulisan sebagai pedoman dalam penyusunan Proposal. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi setiap bab yang disusun secara runtut dan sistematis. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab utama yang masing-masing membahas aspek berbeda dalam penelitian, yaitu :

1.6.1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menyajikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, Rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini menjadi dasar pijakan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian yang dilakukan.

1.6.2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori-teori serta konsep-konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Tinjauan pustaka ini menjadi fondasi konseptual yang mendukung pembentukan argumen penelitian secara sistematis. Di sisi lain, bagian ini juga mengulas berbagai hasil studi sebelumnya yang relevan dari segi topik, objek penelitian, maupun pendekatan yang diterapkan.

1.6.3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena rendahnya partisipasi pelaku IKM dalam pelaporan melalui SIINAS. Selain itu, Bab III juga menguraikan lokasi dan waktu penelitian, kriteria serta penentuan informan penelitian yang dipilih secara purposive, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, serta teknik analisis data yang digunakan. Pada bagian akhir, dijelaskan pula teknik keabsahan data

melalui triangulasi untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

1.6.4. BAB IV Hasil Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi gambaran lokasi penelitian, profil Dinas PPKUKM Jakarta Selatan, serta pemaparan dan analisis hasil penelitian mengenai optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional dalam meningkatkan partisipasi Industri Kecil dan Menengah.

1.6.5. BAB V Penutup

Pada bagian kesimpulan dijelaskan rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai optimalisasi SIINAS dalam meningkatkan partisipasi Industri Kecil dan Menengah di Dinas PPKUKM Jakarta Selatan. Selanjutnya, bagian saran mengisi rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya serta pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Dinas PPKUKM, dan pelaku IKM, sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan SIINAS ke depannya.

